

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Mayya Zaari Khoiriyah¹, Siti Aliyah²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang, mazaariik@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang, wildankafa@yahoo.com

ABSTRAK

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah kinerja keuangannya. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan adalah untuk menyampaikan tata tertib pemerintahan secara efektif, memberikan arahan dalam mencapai tujuan kinerja keuangan baik moneter maupun nonmoneter, dan membantu atasan dalam pengambilan keputusan. Sasaran penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2022 yang dipengaruhi oleh rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan ukuran pemerintah daerah. Sedangkan unsur yang mempengaruhi menggunakan rasio kemandirian daerah, efektivitas pendapatan asli daerah dan ukuran pemerintah daerah. Sedangkan kinerja keuangan merupakan unsur yang dipengaruhi. Untuk tahun 2020–2022, populasi yang digunakan meliputi seluruh kota dan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Untuk memperoleh pengujian yang memenuhi persyaratan, informasi dikumpulkan melalui dokumentasi yang dikombinasikan dengan purposive sampling. Ada 28 sampel akhir pengujian yang diperoleh, dengan total 84 observasi antara tahun 2020 hingga 2022. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dipengaruhi secara negatif tidak signifikan oleh variabel rasio kemandirian daerah, efektivitas kemandirian daerah dan ukuran pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

One metric that can be used to assess a region's ability to conduct regional governance is its monetary performance. The goal of monetary performance estimation is to effectively convey government procedures, provide guidance on achieving both monetary and non-monetary performance goals and assist superiors in making decisions. The goal of the study is to determine how the Central Java Province's regional financial performance in 2020–2022 is impacted by the regional freedom ratio, local income viability and local government measure. While the free factors make use of the proportion of regional freedom, the sufficiency of local income and the assessment of local government, this takes into account the subordinate variable of regional monetary success. For the years 2020–2022, the population used includes all cities and regions in the Central Java Province. To obtain a test that satisfies the requirements, the information is gathered through documentation combined with a purposive examination approach. There were 28 recent tests obtained, totalling 84 perceptions between 2020 and 2022. The results of the investigation suggest that regional monetary performance is negatively impacted by the regional freedom proportion variable. Regional financial performance is marginally impacted negatively by the local unique salary adequacy variable. The regional monetary performance is negatively impacted by the regional government estimate variable, but this effect is negligible.

Keywords : Regional financial performance, regional freedom proportion, viability of local income, local government measure.

A. PENDAHULUAN

Sejak 1 Januari 2001, Indonesia telah mengimplementasikan otonomi daerah dimana tiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola perekonomiannya sendiri



berdasarkan asas desentralisasi. Untuk menerapkan kebijakan otonomi, pemerintah daerah harus mengelola keuangan daerah secara independen. Tujuan dari pengelolaan mandiri keuangan daerah untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dari proses pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga pengukuran kinerja keuangan daerah penting dilakukan. Syahirah (2022) berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan ukuran untuk menilai kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dengan tujuan untuk mengomunikasikan strategi pemerintahan dengan lebih efektif, menyediakan indikator pencapaian kinerja (keuangan dan nonkeuangan), serta mendukung dalam pengambilan keputusan.

Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dengan berbagai parameter yakni rasio independensi (kemandirian), efektivitas, efisiensi, aktivitas, pertumbuhan, serta debt service coverage (Halim dan Sumardjo dalam Karno, 2021). Hakiki dkk. (2023) dan Anynda (2020), rasio kemandirian daerah digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama ini digunakan untuk mengukur keberhasilan keuangan daerah (Kusuma dan Handayani dalam Karno, 2021). Rasio kemandirian daerah (Hakiki dkk, 2023); ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) (Ramahdani dan Trisnaningih, 2022); serta karakteristik pemerintah daerah (Siregar, 2020) dapat memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Salah satu elemen krusial dalam menilai kinerja keuangan daerah adalah rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan belanja dan mengurangi ketergantungan dana dari luar, seperti dana transfer pusat (Syarifah, 2020). Setelah memperoleh pajak dan retribusi yang memadai, pemerintah daerah dapat mendanai sendiri proyek, perluasan dan layanan masyarakatnya. Pemerintah daerah dapat menghimpun dana melalui berbagai cara, termasuk dana transfer pusat, pinjaman, serta pajak dan retribusi. Dampak rasio kemandirian daerah terhadap kinerja anggaran daerah ditunjukkan oleh Anynda (2020), sedangkan Azzahro (2023) rasio kemandirian daerah memiliki dampak positif meskipun relatif kecil terhadap kinerja keuangan daerah.

Efisiensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan syarat kedua. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, mengamanatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sarana basis moneter yang berfungsi sebagai modal fiskal bagi industri dan pertumbuhan daerah, sehingga meminimalkan ketergantungan pada dukungan pemerintah pusat. Keberhasilan suatu daerah dilihat melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan pemeliharaan dinamika perekonomian. Pendapatan asli daerah yang dapat dihimpun secara benar dan terpadu menunjukkan bahwa suatu daerah mampu memanfaatkan kekayaannya secara maksimal sebagai penghasil pendapatan asli daerah. Menurut Ijtihad dan Harsono (2022), efisiensi pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan keuangan daerah. Akan tetapi, Anynda (2020) menegaskan bahwa hal tersebut tidaklah demikian.

Ukuran (size) merupakan besar kecilnya struktur organisasi dan aktivitas pemerintahan dalam suatu negara atau daerah. Kusumawardani dalam Karno (2021) mengemukakan ukuran (size) yang besar memiliki kontribusi terhadap kegiatan operasional pemerintahan diiringi dengan peningkatan kinerja fiskal daerah. Menurut Mustikarini dan Fitriasari dalam Karno (2021), besarnya pemerintahan daerah memiliki imbas positif yang besar terhadap kinerja keuangan daerah. Akan tetapi,

Ramahdani dan Trisnainingsih (2022) mengindikasikan bahwa performa keuangan daerah kurang begitu dipengaruhi oleh besarnya pemerintahan daerah.

Kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020–2022 menjadi topik utama penelitian. APBD Jawa Tengah mampu menunjukkan kinerja yang optimal. Pendapatan Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dan memenuhi target realisasi pendapatan. Tabel I dalam Lampiran I menunjukkan data kinerja keuangan daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020–2022. Data menunjukkan sebanyak 25 wilayah di Jawa Tengah kinerja keuangannya fluktuatif, 3 wilayah mengalami penurunan dan 7 wilayah mengalami peningkatan. Jumlah keseluruhan dalam tabel 1 lampiran 1 menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah di 35 wilayah Provinsi Jawa Tengah dibawah 100% yang artinya terjadi efisiensi pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada perbandingan realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan. Data kinerja keuangan dihimpun melalui laporan realisasi anggaran yang telah diperiksa dan diaudit. Laporan realisasi anggaran dilihat melalui situs online resmi milik Kementerian Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Daerah (DJPK) pada <https://djpk.kemenkeu.go.id/>

B. KAJIAN TEORI

Teori Sinyal

Michael Spence dalam Anynda (2020) menjelaskan tentang teori sinyal bahwa bagaimana pemilik informasi menyampaikan isyarat kepada penerima informasi. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai pemberi dan pemilik sinyal berupa informasi keuangan, sedangkan publik (masyarakat) sebagai penerima sinyal. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan sinyal tersebut kepada publik. Sinyal yang disampaikan dapat berupa informasi yang relevan, kredibel dan dapat berguna untuk menilai kinerja serta kredibilitas pemerintah daerah. Teori sinyal bertujuan untuk membangun sinergi yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Teori sinyal menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang transparan, relevan dan akuntabel. Kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal yang kuat serta pengungkapan informasi tepat waktu merupakan sinyal positif yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan

Perekonomian daerah merupakan barometer yang baik untuk menilai keberhasilan suatu program pemerintah. Sumardjo dalam Karno (2021) menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil akhir dari suatu program atau kegiatan yang sedang atau telah selesai dilaksanakan secara terukur dan berkaitan dengan pemanfaatan anggaran daerah. Penilaian keberhasilan pelayanan publik merupakan salah satu tolok ukur kinerja daerah. Dalam teori sinyal, pemerintah bertindak sebagai pemilik informasi mengenai kinerja keuangan daerah. Pemerintah dapat menyampaikan informasi keuangan daerah melalui berbagai cara, salah satunya laporan keuangan. Informasi fiskal dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan berkualitas menunjukkan sinyal positif untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah. Kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat untuk mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, sinyal negatif ditunjukkan melalui penyampaian informasi laporan keuangan daerah yang tidak transparan dan



mengurangi kepercayaan terhadap kinerja keuangan daerah. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah mengakibatkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah.

Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah mencerminkan tingkat ketergantungan daerah terhadap keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu metrik penting untuk menilai kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri adalah rasio kemandirian daerah. Sebagai sumber utama pendapatan asli daerah (PAD), kepatuhan pajak dan retribusi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Daerah kurang bergantung pada uang transfer dari pemerintah pusat ketika rasio kemandiriannya tinggi. Semakin besar ketergantungan suatu daerah terhadap uang transfer dari pemerintah pusat, semakin kecil rasio kemandiriannya. Dalam teori sinyal menjelaskan proses yang digunakan pemerintah (pemilik sinyal) untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat/publik (penerima sinyal) dengan meningkatkan pendapatannya (sumber sinyal) dan mendorong warga negaranya untuk ikut serta dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak dan retribusi yang tertib. Masyarakat lebih percaya pada tanggung jawab kinerja fiskal pemerintah daerah ketika pendapatan daerah meningkat dan ketergantungan pada dana eksternal menurun. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada tanggung jawab kinerja fiskal pemerintah daerah ketika pendapatan daerah menurun dan melihat peningkatan ketergantungan pada dana pemerintah pusat.

Efektivitas PAD

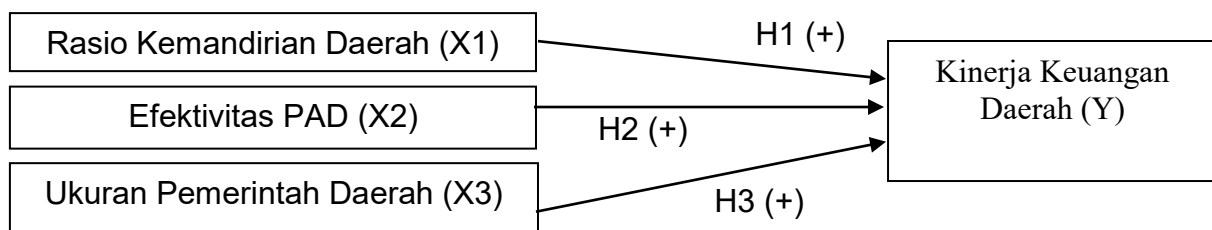
Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan aset yang terpisah, retribusi daerah, penerimaan pajak, pengelolaan aset daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan sumber pendanaan yang berasal dari daerah yang bersangkutan, sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Halim dalam Anynda (2020) keberhasilan pendapatan asli daerah bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelolanya untuk mencapai sasaran berdasarkan potensi nyata daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan PAD yang digali untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah dan meminimalkan ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat (Mardiasmo dalam Karno, 2021). Kemampuan mengenali dan memahami potensi sumber yang ada di daerah merupakan suatu keharusan bagi pemerintah daerah. Keberhasilan pengelolaan PAD akan lebih berhasil apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber tersebut secara efektif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan efektif memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat, maka terdapat korelasi antara efektivitas pendapatan asli daerah dengan teori sinyal. Karena masyarakat dapat menilai bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola dengan baik, maka sinyal positif menunjukkan adanya tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah rendah karena pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tidak efisien, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dan munculnya sinyal negatif.

Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Damapour dalam Uthayla (2022), besar kecilnya pemerintah daerah ditentukan oleh total *output*, jumlah pegawai, total aset, dan total pendapatannya. Karena total aset dianggap lebih stabil, maka aset digunakan sebagai alat ukur.

Kusumawardani dalam Karno (2021) menyatakan bahwa semakin besar wilayah maka semakin mudah bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatannya, sehingga pendapatan daerah pun akan semakin meningkat. Pemerintah daerah yang semakin besar harus mempublikasikan keuangannya. Pelaksanaan operasional daerah semakin mudah dengan besarnya daerah sehingga dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Besarnya daerah akan meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan disebabkan oleh tekanan untuk mengungkapkan laporan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Melalui ukuran (*size*) yang besar memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah sebagai pemegang informasi terkait kinerja keuangan daerah memiliki kewajiban mengungkapkan informasi keuangan kepada masyarakat. Ketika pemerintah daerah memegang aset dalam jumlah besar, mengindikasikan publik bahwa tata kelola pemerintah daerah harus diawasi secara ketat karena khawatir terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat yang memantau ketat tentang pengelolaan keuangan daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan wilayahnya dengan efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sehingga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja fiskal pemerintah yang baik. Dalam rangka menaikkan nilai kinerja keuangan, penyampaian aspek positif dapat diberikan dalam bentuk pelaporan tentang nilai positif kinerja pemerintah daerah terkait (Sumardjo dalam Karno, 2021). Semakin besar total aset, maka semakin besar ukuran (*size*) daerah dan semakin besar juga tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sehingga kepercayaan masyarakat terkait kinerja keuangan daerah tinggi. Kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja keuangan daerah menunjukkan sinyal positif dan sebaliknya, sinyal negatif ditunjukkan jika total aset menurun sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah rendah.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

1. Hubungan Rasio Kemandirian Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah suatu daerah merupakan indikasi sejauh mana masyarakatnya terlibat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin besar pula peran masyarakat terhadap kepatuhan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kesejahteraan masyarakat meningkat karena pendapatan daerah tumbuh sebanding dengan pajak dan retribusi masyarakat (Anynda, 2020). Kemandirian yang tinggi memberikan sinyal positif kepada masyarakat. Rasio kemandirian yang tinggi menunjukkan berkurangnya ketergantungan pemerintah pusat, yang mendorong keberhasilan keuangan daerah. Rasio kemandirian daerah yang rendah menyiratkan bahwa otoritas lokal tidak



berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Kinerja keuangan daerah akan turun karena ketergantungan pemerintah pusat meningkat dan rasio kemandirian daerah menurun. Anynda (2020) mengatakan rasio kemandirian daerah mendorong kinerja keuangan.

H1 : Diduga rasio kemandirian daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah

2. Hubungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah

Efektivitas PAD adalah ilustrasi sejauh mana pemerintah daerah sanggup memenuhi target PAD. Rasio ini diperoleh melalui target pendapatan asli daerah yang telah disetujui berdasarkan potensi riil/nyata dengan realisasinya. Pengelolaan PAD yang efisien akan mengurangi defisit pendapatan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi dan pajak daerah dilakukan secara maksimal, sehingga mendorong kepercayaan masyarakat terhadap keuangan pemerintah daerah dan timbul sinyal positif. Pendapatan asli daerah menurun akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan daerah akibat retribusi dan pajak yang tidak dikelola dengan baik sehingga menunjukkan sinyal negatif. Anynda (2020) dan Ramahdani (2022) menyatakan efektivitas pendapatan asli daerah akan meningkatkan kinerja keuangan. PAD suatu daerah dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah karena PAD yang lebih besar menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang optimal sehingga efektivitas PAD akan meningkatkan performa kinerja keuangan daerah.

H2 : Diduga efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah

3. Hubungan Ukuran Pemerintah Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah

Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi pengungkapan kinerja keuangan adalah ukuran (*size*). Semakin bertambah luas skala pemerintahan, semakin kompleks kegiatan dan tanggung jawabnya, sehingga diperlukan pengungkapan informasi fiskal yang lebih ekstensif dan transparan. Ukuran pemerintah daerah seringkali dinilai melalui total aset dan dapat ditentukan dari luas wilayah serta jumlah penduduk (Banunaek dkk, 2022). Kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi ukuran (*size*) karena semakin besar ukuran (*size*), maka aset yang diperoleh pemerintah daerah juga semakin besar. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah dengan mendukung kegiatan operasional menggunakan aset daerah. Ukuran (*size*) yang besar menandakan aset yang dimiliki juga besar dan kinerja meningkat, sehingga timbul sinyal positif. Sinyal negatif bekerja sebaliknya. Tama dan Adi dalam Karno (2021) menemukan bahwa ukuran (*size*) yang lebih besar berpengaruh terhadap kinerja fiskal daerah sehingga mendukung hasil penelitian Karno (2021) dan Banunaek dkk. (2022).

H3 : Diduga ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah

C. METODE PENELITIAN

Penelitian didasarkan pada laporan realisasi anggaran Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2020–2022 yang dapat diakses pada <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Buku, arsip, gambar tekstual, catatan, dan foto menyediakan data dokumenter (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggabungkan data dan dokumen sekunder dengan objek 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah. Analisis mencakup 39 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah menyampaikan laporan anggaran 2020–2022 menggunakan teknik *purposive sampling*. Ghazali (2021) mendefinisikan uji asumsi klasik sebagai kumpulan uji statistik untuk menjamin model regresi linier sesuai dengan asumsi. Uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas dilakukan dalam penelitian. Analisis yang digunakan menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Untuk definisi operasional variabel meliputi :

1. Kinerja Keuangan Daerah

Hamzah dalam Anynda (2020) menyatakan bahwa salah satu pendekatan untuk menilai kinerja ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat seberapa baik layanan publiknya berjalan. Rasio efisiensi merupakan metrik yang berguna untuk membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan realisasi pengeluaran. Berikut ini adalah cara penilaian kinerja fiskal pemerintah daerah, menurut Hamzah dalam Anynda (2020):

$$\text{Kinerja Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

2. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah menentukan seberapa besar pemerintah daerah dapat membelanjakan dananya untuk pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan (Ardhini dalam Anynda, 2020). PAD dibandingkan dengan total pendapatan transfer untuk mengukurnya. Ardhini dalam Anynda (2020) menghitung rasio kemandirian daerah dengan menggunakan proksi :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

3. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Ardhini dalam Anynda (2020) menyatakan bahwa seberapa baik pemerintah daerah mampu mencapai tingkat pendapatan daerah yang direncanakan dan ditargetkan merupakan definisi efektivitas pendapatan asli daerah. Efisiensi pendapatan asli daerah merupakan ukuran kapasitas pemerintah untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan administrasi. Pengukuran rasio efektivitas dengan membandingkannya dengan pendapatan daerah secara keseluruhan dan target pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja keuangan daerah yang baik merupakan indikasi tingkat efektivitas yang tinggi.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Ukuran Pemerintah Daerah

Menurut Sari et al. (2019) total aset suatu daerah digunakan untuk memprediksi besar kecilnya pemerintahan daerah. Optimalisasi pelayanan



didukung oleh aset yang cukup. Faktor-faktor untuk menentukan besar atau kecilnya pemerintahan daerah : total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas (Putri & Amanah, 2020). Ramahdani (2022) menyatakan untuk mengukur ukuran pemerintah menggunakan rumus :
 Ukuran Pemerintah = Ln (Total Aset Pemerintah Daerah)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan deskripsi statistik, telah diperoleh populasi menggunakan *purposive sampling* dalam penelitian sebanyak 105 pada 35 wilayah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2022. Pemerintah daerah yang tidak menyampaikan LKPD secara lengkap ada, sehingga jumlah sampel akhir menjadi 84.

Tabel Hasil Penentuan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah seluruh pemerintah daerah di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	35
Pemerintah daerah yang menyampaikan LKPD tidak lengkap pada tahun anggaran 2020-2022 (tidak memenuhi <i>sampling</i>)	(7)
Total sampel	28
Tahun pengamatan	3
Jumlah observasi selama periode pengamatan 2020-2022	84
Sumber : Data sekunder diolah, 2024	

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Analisis Statistik Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RKD	84	15.72%	263.64%	114.2458%	65.69837%
EPAD	84	13.41%	174.66%	89.8355%	40.67835%
UPD	84	25.03	30.74	29.0447	.77662
KKD	84	76.12%	98.59%	91.2359%	3.99890%
Valid N (listwise)	84				
Sumber : Data sekunder diolah, 2024					

Penjelasan tabel sebagai berikut :

- Variabel X1 (RKD) memiliki nilai minimum 15,72% yakni Kabupaten Pati pada tahun 2022. Nilai maximum 263,64% yakni Kota Semarang pada tahun 2020.
- Variabel X2 (EPAD) memiliki nilai minimum 13,41% yakni Kabupaten Pati pada tahun 2022 dan nilai maximum 174,66 % yakni Kabupaten Sragen pada tahun 2021.
- Besaran X3 (UPD) yaitu Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 adalah variabel X3, dan besaran UPD tersebut paling sedikit sebesar Rp25,03 (dalam jutaan rupiah). Nilai tertinggi adalah Kota Semarang pada tahun 2022, yaitu sebesar Rp30,74 (dalam jutaan rupiah).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengevaluasi apakah data mengikuti distribusi teratur atau sebaliknya. Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) menentukan kenormalan. Jika signifikansi lebih dari 5%, maka hasilnya normal dan sebaliknya (Ghozali, 2021). Hasil uji normalitas penelitian ini :

Tabel Hasil Uji Normalitas

N	84
Test Statistic	.085
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{a,d}

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Tingkat signifikansinya pada tabel sebesar 0,200 dan lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Oleh karena data normal, hipotesis awal (H₀) diterima.

Uji Autokorelasi

Ghozali (2021) menyatakan bahwa salah satu cara untuk memeriksa korelasi antara galat periode *t* dengan galat periode *t-1* (sebelum *t-1*) adalah dengan menerapkan uji autokorelasi, yang merupakan pendekatan pengujian regresi linier. Pengujian autokorelasi adalah uji coba yang memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan tingkat signifikansi. Jika signifikansi melampaui 0,05, maka terjadi autokorelasi; jika kurang dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Berikut ini penjelasan hasil uji autokorelasi penelitian tersebut pada Tabel:

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Total Cases	84
Asymp. Sig. (2-tailed)	.028

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel, nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,028 dan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi autokorelasi dan hipotesis awal (H₀) diterima.

Uji Multikolinearitas

Jika ingin mengetahui apakah variabel independen model regresi berkorelasi, dapat menggunakan uji multikolinearitas (Ghozali, 2021). Untuk mengevaluasi ada atau tidaknya multikolinearitas, menggunakan nilai Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF). Jika VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,10, multikolinearitas tidak terjadi. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
RKD	0,650	1,540	Tidak terjadi multikolinearitas
EPAD	0,651	1,537	Tidak terjadi multikolinearitas
UPD	0,995	1,005	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah, 2024



Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan nilai tolerance lebih dari ($>$) 0,10 dan nilai VIF kurang dari ($<$) 10. Dengan demikian, tidak terjadi multikolinearitas sehingga hipotesis awal (H_0) diterima.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk melihat apakah varians residual dalam model regresi konsisten di seluruh pengamatan, digunakan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Heteroskedastisitas diartikan sebagai nilai probabilitas yang menunjukkan signifikansi $\leq 0,05$, atau 5%, sesuai persyaratan uji Park. Untuk nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%), heteroskedastisitas tidak terjadi.

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
RKD	0,764	Tidak terjadi heteroskedastisitas
RKD	0,541	Tidak terjadi heteroskedastisitas
UPD	0,054	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel tidak menunjukkan heteroskedastisitas dan dengan demikian H_0 diterima karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Uji Hipotesis

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari regresi linier berganda adalah untuk meramalkan perubahan nilai variabel independen dan dependen dengan menggambarkan korelasi di antara keduanya. Berikut adalah hasil uji regresi linier berganda, seperti yang ditunjukkan pada tabel :

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B
(Constant)	109,778
RKD	-0,010
EPAD	-0,013
UPD	-0,560

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel, maka model penelitiannya sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Keuangan Daerah} = 109,778 + (-0,010 \text{ RKD}) + (-0,013 \text{ EPAD}) + (-0,560 \text{ UPD}) + e$$

- Berdasarkan konstanta penelitian sebesar 109,778 apabila nilai kinerja keuangan daerah sebesar 109,778 maka variabel bebas dikatakan konstan. Kenaikan satu satuan rasio kemandirian daerah (RKD) akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan daerah sebesar -0,010, berdasarkan koefisien regresi RKD sebesar -0,010.
- Setiap kenaikan satu satuan efisiensi pendapatan asli daerah (EPAD) maka kinerja keuangan daerah akan turun sebesar -0,013, berdasarkan koefisien regresi sebesar -0,013.

- c. Kinerja keuangan daerah akan turun sebesar -0,560 untuk setiap kenaikan satu satuan besaran pemerintah daerah, berdasarkan koefisien regresi besaran pemerintah daerah sebesar -0,560.

Hasil Uji Parsial

Menurut Ghozali (2021), uji statistik T dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana satu variabel independen atau penjelas dapat menjelaskan variasi variabel dependen, dengan syarat tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Tabel di bawah ini menampilkan temuan analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis:

Tabel Hasil Uji Parsial

Variabel	B	Sig	Keterangan
(Constant)	131,566	0	
RKD	-0,010	0,240	H1 ditolak
EPAD	-0,013	0,319	H2 ditolak
UPD	-0,560	0,316	H3 ditolak

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Hasil penelitian uji parsial (uji t) pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil Uji Hipotesis Satu (H1)

Untuk memahami bagaimana rasio kemandirian daerah (RKD) mempengaruhi kinerja keuangan daerah, dilakukan uji hipotesis pertama (H1). Uji t, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi, digunakan untuk menguji hipotesis pertama. Tabel 8 menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah (RKD) memiliki tanda koefisien negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,240. Oleh karena temuan penelitian menandakan rasio kemandirian daerah memiliki dampak negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, maka H1 ditolak.

b. Hasil Uji Hipotesis Dua (H2)

Uji hipotesis kedua (H2) untuk mengetahui bagaimana efektivitas pendapatan daerah memengaruhi kinerja keuangan daerah. Hipotesis kedua diuji menggunakan uji-t, yang menghasilkan nilai signifikansi. Terdapat tanda koefisien negatif dan nilai signifikansi sebesar 0,319 untuk efektivitas pendapatan daerah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8. Dengan demikian, H2 ditolak karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dipengaruhi secara negatif dan tidak signifikan oleh efektivitas pendapatan daerah.

c. Hasil Uji Hipotesis Tiga (H3)

Ketiga, menguji hipotesis (H3) bahwa ukuran UPD memberikan dampak terhadap kinerja keuangan daerah. Hipotesis ketiga yang diperlihatkan melalui nilai signifikansi menggunakan uji t. Ukuran (*size*) memiliki tanda koefisien negatif dengan signifikansi sebesar 0,316, sesuai dengan Tabel 8. Temuan penelitian memperlihatkan ukuran (*size*) kurang berdampak dan tidak berpengaruh besar terhadap kinerja fiskal daerah, sehingga menunjukkan bahwa H3 tidak terbukti.

Hasil Uji Determinasi

Koefisien determinasi adalah alat statistik untuk memperkirakan hubungan antara dua variabel; independent (x) dan dependen (y). Untuk mendapatkan model regresi yang optimal, digunakan Adjusted R-Square. Terdapat interval diskrit dari 0



hingga 1 yang mewakili koefisien determinasi. Hasil uji determinasi ditampilkan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,275	0,075	0,041

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Ukuran pemerintah daerah, efektivitas pendapatan daerah, dan rasio kemandirian daerah merupakan tiga variabel independen yang menjelaskan 4,1% varians kinerja keuangan daerah. Menurut tabel 9 menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,041. Sisanya, 95,9%, dapat diatribusikan pada variasi lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di setiap daerah. Kepatuhan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian terbesar dari pendapatan asli adalah refleksi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah. Selain pajak dan retribusi, pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari badan usaha milik daerah dan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dimana merupakan hasil pengelolaan keuangan daerah yang sah. Sebagaimana yang diajukan dalam hipotesis pertama (H1), kinerja keuangan daerah ditingkatkan secara signifikan oleh rasio kemandirian daerah. Menolak hipotesis pertama, bahwa rasio kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan daerah.

Rasio kemandirian daerah yang tinggi dan rendah belum mampu menyiratkan kinerja keuangan daerah dari 35 daerah di Provinsi Jawa Tengah. Tingginya rasio kemandirian belum sejalan dengan kinerja keuangan yang rendah. Namun, secara teori rasio kemandirian daerah yang meningkat dikoneksikan dengan kinerja keuangan yang lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki rasio kemandirian yang tinggi dengan kinerja keuangan daerah yang buruk dan rasio kemandirian yang lebih rendah terikat dengan kinerja keuangan yang lebih baik. Alasan di balik ini adalah ketergantungan dana pusat yang tinggi pada pembiayaan fiskal daerah Provinsi Jawa Tengah. Dalam laporan realisasi anggaran, jumlah transfer total melampaui jumlah pendapatan asli daerah. Jelas bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih bergantung pada dana yang dikirim dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa belum memenuhi kewajiban keuangannya sendiri.

Berdasarkan teori sinyal, hal ini menunjukkan sinyal negatif yang berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat tentang pengelolaan pendapatan asli daerah. Meskipun pelayanan terhadap masyarakat sudah efisien, akan tetapi pendapatan asli daerah yang lebih kecil daripada pendapatan transfer dapat memberikan penilaian kepada masyarakat bahwa dalam pengelolaan sumber daya yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah belum dilakukan secara signifikan. Kesimpulan penelitian sebelumnya, Anynda (2020) menyimpulkan bahwa rasio kemandirian daerah secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan daerah, tetapi tidak didukung oleh temuan peneliti. Sama halnya dengan penelitian Hakiki

(2023) sebelumnya, temuan peneliti menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah memiliki dampak negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Halim dalam Anynda (2020), efektivitas pendapatan asli daerah ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan asli daerah yang direncanakan dan disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan, sesuai dengan potensi daerah yang riil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dihimpun dari daerah itu sendiri. PAD digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan kegiatan operasional di daerah, sehingga tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah pusat (Mardiasmo dalam Karno, 2021).

Efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan daerah, sesuai dengan hipotesis kedua (H2). Oleh karena efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, maka hasil uji hipotesis menyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.

Data efektivitas pendapatan asli daerah di 35 daerah di Provinsi Jawa Tengah tidak menunjukkan kinerja keuangan daerah yang baik. Nilai efektivitas pendapatan daerah yang tinggi mengindikasikan keberhasilan pembiayaan daerah yang tidak berbanding lurus. Terdapat korelasi positif antara penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya retensi PAD mengarah pada efektivitas PAD yang besar sehingga mendorong kinerja keuangan daerah, sebagaimana dikemukakan oleh Uthaylah (2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai efektivitas pendapatan daerah yang tinggi, yang dikaitkan dengan kinerja keuangan daerah yang buruk. Begitu pula sebaliknya, kinerja keuangan daerah yang kuat dikaitkan dengan nilai efektivitas pendapatan daerah yang lebih rendah. Pasalnya, sebagaimana dinyatakan dalam laporan anggaran, realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dari target pendapatan yang ditetapkan berdasarkan potensi riil, sehingga hal tersebut bisa terjadi. Target PAD masih belum mampu dicapai oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah belum memiliki langkah proaktif untuk memanfaatkan sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan daerahnya sendiri, meskipun memiliki kemampuan atau kapabilitas dalam mengelola pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan asli daerah pada pemerintah di Provinsi Jawa Tengah perlu mendapat perhatian yang lebih intensif karena dapat memberikan sinyal negatif kepada publik. Penerimaan pendapatan asli daerah yang belum mencapai target dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah belum cukup memiliki kemampuan fiskal dalam pembangunan daerah yang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai dampak terhadap pendapatan asli daerah akibat tidak efektifnya pengelolaan retribusi daerah dan pemungutan pajak. Temuan penelitian ini bertentangan dengan temuan Anynda (2020) yang menemukan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah daerah merupakan entitas yang sangat besar jika dievaluasi dari ukurannya. Ukuran pemerintah daerah dapat diperkirakan menggunakan berbagai



metrik, termasuk jumlah personel, total aset, total pendapatan, dan tingkat produktivitas (Damanpour dalam Uthayla, 2022). Pemerintah daerah yang lebih besar lebih mampu mendanai operasinya sendiri, yang pada gilirannya mengarah pada hasil keuangan yang lebih baik, klaim Kusumawardani dalam Karno (2021).

Korelasi positif dan signifikan antara ukuran pemerintah daerah dan kinerja keuangan daerah ditunjukkan dalam H3. Hipotesis ketiga ditolak karena fakta bahwa temuan uji hipotesis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah secara negatif dan tidak signifikan dipengaruhi oleh ukurannya. Data 35 wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan total aset daerah sebagai proksi ukuran (*size*) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang besar ataupun kecil tidak lagi menunjukkan kinerja keuangan yang kuat. Besarnya ukuran (*size*) pemerintah daerah berbanding terbalik dengan kinerja keuangan daerah. Semakin besar ukuran (*size*) yang diproksikan melalui total asset, maka semakin kompleks pula kegiatan dan tanggung jawabnya, sehingga diperlukan pengungkapan informasi keuangan yang lebih komprehensif dan transparan. Besar aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah dapat menyebabkan pemerintah daerah sulit melakukan pengawasan terhadap aset daerah yang dimiliki. Hal ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan aset daerah yang dapat berdampak pada kinerja keuangan daerah. Dalam laporan neraca, tercatat mayoritas aset pemerintah Provinsi Jawa Tengah tergolong nonproduktif, artinya aset tersebut tidak memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan daerah. Menurut teori sinyal memberikan tanda negatif tentang seberapa besar kepercayaan publik terhadap pengungkapan dan pengelolaan aset daerah. Konsisten dengan penelitian Ramahdani et al. (2022), penelitian ini menemukan bahwa kinerja keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel rasio kemandirian daerah memiliki hubungan lemah dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020–2021.
- b. Variabel efektivitas pendapatan asli daerah cenderung negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2021.
- c. Variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020–2021.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, saran bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator tambahan untuk mengukur kinerja keuangan daerah agar variabel independen dapat digunakan lebih sering.
2. Untuk menambah jumlah sampel, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperpanjang tahun penelitian karena penelitian ini hanya mengumpulkan data selama kurun waktu tiga tahun (2020–2022).
3. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menggunakan objek daerah lain sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anynda, N.S. (2020). "Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *JIRA : Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(10)"
- Ardhini. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, *Undip Institutional Repository*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Azzahro, N.A., Marhaban, I., & Nurhasannah. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2017-2021. *JAM : Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 2(4).
- Banunaek, I. A., A. Manafe, H. ., & Perseveranda, M. . (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 49–59. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1372>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2020). Data Keuangan Daerah Setelah T.A 2006, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Diakses pada 29 Mei 2024
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2021). Data Keuangan Daerah Setelah T.A 2006, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Diakses pada 31 Mei 2024
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2022). Data Keuangan Daerah Setelah T.A 2006, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, Diakses pada 2 Juni 2024
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 24*, Edisi 8, Cetakan VIII, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hakiki, D. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, 10(1) : 56-78.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ijtihad, R. & Iwan, H. (2024). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah, *Jurnal Ganec Swara*, 18(1) : 41-50.
- Karno, D. & Alliyah, S. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa. *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(1), 40 -55. Retrieved from <https://jurnal.unimor.ac.id/index.php/JIE/article/view/1264>
- Kusumawardani, A.R., & Nur, H. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESA), Surabaya.



- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Mustikarini, W.A., & Debby Fitriasari. (2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007, Forum Simposium Nasional Akuntansi 15, pp.
- Putri, A.R.P., & Lailatul, A. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(8).
- Ramahdani, A.F., & Sri, T. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Costing: Journal of Economic, Business, and Accounting*, 6(1), 301-310
- Sari, N.M.D.P., & I Ketut Mustanda. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759-4787
- Siregar, I.C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua, *JAM : Jurnal aplikasi Manajemen*, 5(1).
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 87, No. 3. (Aug., 1973), pp. 355-37
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta Bandung.
- Syahirah, M. Y., & Nur, F.A.H. (2023). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan Menggunakan Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. *JAP : Jurnal Akuntansi Publik*, 1(4), 40-56.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Uthaylah. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Leverage dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019, *Skripsi*, Universitas Jambi, Jambi.